



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 157/SK-BUP/HK/2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

- BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. bahwa telah disusun dan diusulkan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan dan Pengendalian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi perizinan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara, tanggal 24 November 2025, perihal Surat Keputusan Penetapan Standar Pelayanan, Standar Operasional Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan jenis Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA: Mekanisme masing-masing Standar Operasional Prosedur Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
- KEEMPAT: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan wajib melaksanakan Standar Operasional Prosedur secara konsisten, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
- KELIMA: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

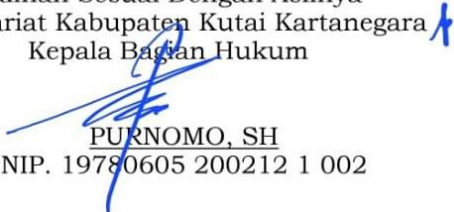
ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PU RNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 157/SK-BUP/HK/2026

TANGGAL 27 APRIL 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

JENIS-JENIS PERIZINAN

- I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN DASAR
 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
 2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 3. Persetujuan Lingkungan Hidup (SKKL, PKPLH dan SPPL)
- II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RISIKO RENDAH
 4. Tingkat Risiko Rendah UMK/NON UMK
- III. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RISIKO MENENGAH RENDAH
 5. Tingkat Risiko Menengah Rendah UMK/NON UMK
 6. Tingkat Risiko Menengah Tinggi
- IV. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DENGAN RISIKO MENENGAH TINGGI
 - A. SEKTOR KESEHATAN
 7. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik (KBLI 47721)
 8. Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (KBLI 81290)
 9. Aktivitas Puskesmas (Persetujuan Sertifikat Standar Puskesmas) (KBLI 86102)
 10. Aktivitas Klinik Pemerintah (KBLI 86104)
 11. Aktivitas Klinik Swasta (KBLI 86105)
 12. Aktivitas Pelayanan Kesehatan
 - B. SEKTOR PERIKANAN
 13. Pembenihan Ikan Laut (KBLI 03212)
 14. Budidaya Ikan Hias Air Laut (KBLI 03213)
 15. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam (03221)

16. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung (KBLI 03222)
17. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba (KBLI 03223)
18. Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah (KBLI 03224)
19. Budidaya Ikan Hias Air Tawar (KBLI 03225)
20. Pembenihan Ikan Air Tawar (03226)
21. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap (KBLI 03227)
22. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya (KBLI 03229)
23. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau (KBLI 03251)
24. Pembenihan Ikan Air Payau (KBLI 03252)
25. Pembesaran Mollusca Air Payau (KBLI 03253)
26. Pembesaran Crustacea Air Payau (KBLI 03254)
27. Pembesaran Tumbuhan Air Payau (KBLI 03255)
28. Budidaya Air Payau Lainnya (KBLI 03259)

C. SEKTOR PARIWISATA

29. Vila (KBLI 55193)
30. Penginapan remaja (KBLI 55191)
31. Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (KBLI 55193)
32. Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan (KBLI 55192)

D. SEKTOR TENAGA KERJA

33. Pelatihan Kerja Teknis Swasta (KBLI 78421)
34. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta (KBLI 78422)
35. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta (KBLI 78423)
36. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta (KBLI 78424)
37. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta (KBLI 78425)
38. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta (KBLI 78426)
39. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta (KBLI 78427)
40. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (KBLI 78429)

E. SEKTOR INDUSTRI

41. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas (KBLI 10120)
42. Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213)
43. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi (KBLI 10216)
44. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (KBLI 10217)

45. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan (KBLI 10219)
46. Industri Pemisahan Fraksinasi Minyak Mentah (KBLI 10433)
47. Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim (KBLI 10510)
48. Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental (KBLI 10520)
49. Industri Sirop (KBLI 10723)
50. Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering (KBLI 10733)
51. Industri Air Minum Isi Ulang (KBLI 11052)
52. Industri Pertenunan (KBLI 13121)
53. Industri Kain Tenun Ikat (KBLI 13122)
54. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan (KBLI 14120)
55. Industri Penyempurnaan Kain (KBLI 13132)
56. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (KBLI 14111)
57. Industri Pakian Jadi (Konveksi) Dari Kulit (KBLI 14112)
58. Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil (KBLI 14131)
59. Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit (KBLI 14132)
60. Industri Pengawetan Kulit (KBLI 15111)
61. Industri Penyamakan Kulit (KBLI 15112)
62. Industri Pencelupan Kulit Bulu (KBLI 15113)
63. Industri Kulit Komposisi (KBLI 15114)
64. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi (KBLI 15121)
65. Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan (KBLI 21014)
66. Industri Ban Luar dan Ban Dalam (KBLI 22111)
67. Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan (KBLI 22290)
68. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya (KBLI 22230)
69. Industri Barang Plastik Lembaran (KBLI 22291)
70. Industri Kaca Lembaran (KBLI 23111)
71. Industri Kaca Pengaman (KBLI 23112)
72. Industri Kaca Lainnya (KBLI 23119)
73. Industri Semen (KBLI 23941)
74. Industri Barang dari Abses untuk Keperluan Bahan Bangunan (KBLI 23955)
75. Industri Barang dari Abses untuk Keperluan Industri (KBLI 23956)

76. Industri Popa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi (KBLI 24103)
77. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk Bangunan (KBLI 25113)
78. Industri Lampu dari Logam (KBLI 25995)
79. Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik (KBLI 26110)
80. Industri Peralatan Telepon dan Faksimili (KBLI 26310)
81. Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi (KBLI 26420)
82. Industri Peralatan Fotografi (KBLI 26710)
83. Industri Batu Baterai (KBLI 27201)
84. Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBLI 27203)
85. Industri Kabel Serat Optik (KBLI 27310)
86. Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga (KBLI 27510)
87. Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga (KBLI 27520)
88. Industri Mesin Kantor dan Akutansi Elektrik (KBLI 28173)
89. Industri Mesin Kantor dan Akutansi Elektronik (KBLI 28173)
90. Industri Mesin Fotocopi (KBLI 28174)
91. Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan (KBLI 29102)
92. Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin (KBLI 35301)
93. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (KBLI 62021)
94. Aktivitas Konsultasi dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI 62029)
95. Aktivitas Hosting dan YBDI (KBLI 63112)
96. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77329)
97. Jasa *Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (KBLI 71206)
98. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi (KBLI 72104)

F. SEKTOR PERHUBUNGAN

99. Angkutan Bus Perbatasan (KBLI 49212)
100. Angkutan Bus Kota (KBLI 49214)
101. Angkutan Bus Khusus (KBLI 49216)
102. Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya (KBLI 49219)
103. Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya (KBLI 49229)
104. Angkutan Perbatasan Bukan Bus Dalam Trayek (KBLI 49411)

105. Angkutan Perkotaan Bukan Bus Dalam Trayek (KBLI 49413)
106. Angkutan Perdesaan Bukan Bus Dalam Trayek (KBLI 49414)
107. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus (KBLI 49415)
108. Angkutan Taksi (KBLI 49421)
109. Angkutan Sewa Khusus (KBLI 49426)
110. Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (KBLI 49429)
111. Angkutan Laut Dalam Negeri *Liner* dan *Tramper* untuk Penumpang (KBLI 50111)
112. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (KBLI 50114)
113. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI 50131)
114. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133)
115. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang (KBLI 50134)
116. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50141)
117. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50142)
118. Angkutan Sungai dan Danau *Liner* (Trayek Tetap dan Teratur) (KBLI 50211)
119. Angkutan Sungai dan Danau *Tramper* (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) (KBLI 50212)
120. Angkutan Penyebrangan Dalam Kabupaten Kota Untuk Penumpang (KBLI 50218)
121. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan (KBLI 50221)
122. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus (KBLI 50222)
123. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya (KBLI 50223)
124. Angkutan Penyebrangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang (KBLI 50228)
125. Aktivitas Perpakiran di Luar Badan Jalan (*Off Stree Parking*) (KBLI 52215)
126. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau (KBLI 52222)
127. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyebrangan (KBLI 52223)

G. SEKTOR PERTANIAN

- 128. Pertanian Jagung (KBLI 01111)
- 129. Pertanian Gandum (KBLI 01112)
- 130. Pertanian Kedelai (KBLI 01113)
- 131. Pertanian Kacang Tanah (KBLI 01114)
- 132. Pertanian Kacang Hijau (KBLI 01115)
- 133. Pertanian Aneka Kacang Horikultura (KBLI 01116)
- 134. Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan (KBLI 01117)
- 135. Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan (KBLI 01118)
- 136. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya (KBLI 01119)
- 137. Pertanian Padi Hibrida (KBLI 01121)
- 138. Pertanian Padi Inbrida (KBLI 01122)
- 139. Pertanian Horikultura Sayuran Daun (KBLI 01131)
- 140. Pertanian Horikultura Buah (KBLI 01132)
- 141. Pertanian Horikultura Sayuran Buah (KBLI 01133)
- 142. Pertanian Horikultura Sayuran Umbi (KBLI 01134)
- 143. Pertanian Aneka Umbi Palawija (KBLI 01135)
- 144. Pertanian Jamur (KBLI 01136)
- 145. Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu (KBLI 01137)
- 146. Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya (KBLI 01139)
- 147. Perkebunan Tebu (KBLI 01140)
- 148. Perkebunan Tembakau (KBLI 01150)
- 149. Pertanian Tanaman Berserat (KBLI 01160)
- 150. Pertanian Tanaman Pakan Ternak (KBLI 01191)
- 151. Pertanian Tanaman Bunga (KBLI 01193)
- 152. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL (KBLI 01199)
- 153. Pertanian Buah Anggur (KBLI 01210)
- 154. Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (KBLI 01220)
- 155. Pertanian Buah Jeruk (KBLI 01230)
- 156. Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (*Pome and Stone Fruits*) (KBLI 01240)
- 157. Pertanian Buah Beri (KBLI 01251)
- 158. Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan (KBLI 01252)
- 159. Pertanian Sayuran Tahunan (KBLI 01253)

160. Pertanian Buah Semak Lainnya (KBLI 01259)
161. Perkebunan Buah Kelapa (KBLI 01261)
162. Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya (KBLI 01269)
163. Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (KBLI 01270)
164. Perkebunan Cengkeh (KBLI 01282)
165. Pertanian Cabai (KBLI 01283)
166. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar (KBLI 01284)
167. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (KBLI 01285)
168. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (KBLI 01286)
169. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik Penyegar, dan Obat Lainnya (KBLI 01289)
170. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (KBLI 01291)
171. Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya (KBLI 01299)
172. Pertanian Tanaman Hias (KBLI 01301)
173. Perternakan Kuda dan Sejenisnya (KBLI 01420)
174. Pembibitan dan Budidaya Domba Potong (KBLI 01441)
175. Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong (KBLI 01442)
176. Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah (KBLI 01443)
177. Pembibitan dan Budidaya Domba Perah (KBLI 01444)
178. Produksi Bulu Domba Mentah (*Raw Wool*) (KBLI 01445)
179. Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh (KBLI 01446)
180. Pembibitan dan Budidaya Rusa (KBLI 01494)
181. Pembibitan dan Budidaya Kelinci (KBLI 01495)
182. Pembibitan dan Budidaya Burung Walet (KBLI 01497)
183. Jasa Pengolahan Lahan (KBLI 01611)
184. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibir/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma (KBLI 01612)
185. Jasa Pemanenan (KBLI 01613)
186. Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara (KBLI 01614)
187. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya (KBLI 01619)
188. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak (KBLI 01621)
189. Jasa Perkawinan Ternak (KBLI 01622)
190. Jasa Penetasan Telur (KBLI 01623)

- 191. Jasa Pasca Panen (KBLI 01630)
- 192. Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan (KBLI 01640)
- 193. Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetika Lainnya (Apotek *Vetriner*, Depo Obat Hewan, dan Toko Obat Hewan) (KBLI 47729)
- 194. Aktivitas Kesehatan Hewan (KBLI 75000)

H. SEKTOR LINGKUNGAN

- 195. Usaha Kehutanan Lainnya (KBLI 02209)
- 196. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37011)
- 197. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37012)
- 198. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021)
- 199. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 38220)

V. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DENGAN RISIKO TINGGI

A. SEKTOR KESEHATAN

- 200. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D (KBLI 86101)
- 201. Aktivitas Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D (KBLI 86103)
- 202. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (KBLI 86109)
- 203. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Persetujuan Izin Unit Tranfusi Darah) (KBLI 86903)
- 204. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Pelayanan *Radiologi* (KBLI 86101)

B. SEKTOR PERIKANAN

- 205. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat (KBLI 03121)
- 206. Penangkapan Crustacea di Perairan Darat (KBLI 03122)
- 207. Penangkapan Mollusca di Perairan Darat (KBLI 03123)
- 208. Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat (KBLI 03124)
- 209. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat (KBLI 03125)
- 210. Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat (KBLI 03126)
- 211. Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat (KBLI 03129)

C. SEKTOR PENDIDIKAN

- 212. Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (KBLI 85121)
- 213. Pendidikan Menengah/Tsanawiyah Swasta (KBLI 85122)
- 214. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/
Bustaanul Athfal (KBLI 85132)
- 215. Pendidikan Kelompok Bermain (KBLI 85133)
- 216. Pendidikan Taman Penitipan Anak (KBLI 85134)
- 217. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (KBLI 85135)
- 218. Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (KBLI 85139)
- 219. Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta (KBLI 85220)
- 220. Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta (KBLI
85240)
- 221. Pendidikan Kebudayaan (KBLI 85420)
- 222. Pendidikan Bahasa Swasta (KBLI 85493)
- 223. Pendidikan Kesehatan Swasta (KBLI 85494)
- 224. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (KBLI
85495)
- 225. Pendidikan Kerajinan dan Industri (KBLI 85498)
- 226. Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi (KBLI 85410)
- 227. Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan (KBLI 85491)
- 228. Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan
Komunikasi) Swasta (KBLI 85492)

D. SEKTOR INDUSTRI

- 229. Kawasan Industri (KBLI 68130)
- 230. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati (KBLI 10411)
- 231. Industri Margarine (KBLI 10412)
- 232. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (KBLI 10431)
- 233. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437)
- 234. Industri Tepung Terigu (KBLI 10616)
- 235. Industri Glukosa dan Sejenisnya (KBLI 10623)
- 236. Industri Pemanis dari Beras dan Jagung (KBLI 10635)
- 237. Industri Gula Pasir (KBLI 10721)
- 238. Industri Kakao (KBLI 10731)
- 239. Industri Makanan Bayi (KBLI 10791)
- 240. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (KBLI 11020)
- 241. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan
Hasil Pertanian Lainnya (KBLI 11020)

- 242. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt (KBLI 11031)
- 243. Industri Malt (KBLI 11032)
- 244. Industri Air (KBLI 11050)
- 245. Industri Sigaret Kretek Tangan (KBLI 12011)
- 246. Industri Rokok Putih (KBLI 12012)
- 247. Industri Sigaret Kretek Mesin (KBLI 12013)
- 248. Industri Rokok Lainnya (KBLI 12019)
- 249. Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya (KBLI 12099)
- 250. Industri Pemintalan Benang Jahit (KBLI 13113)
- 251. Industri Kain Pita (*Narrow Pabric*) (KBLI 13991)
- 252. Industri Menghasilkan Kain Keperluan Industri (KBLI 13992)
- 253. Industri Non Woven (KBLI 13993)
- 254. Industri Kain Ban (KBLI 13994)
- 255. Industri Kertas Berharga (KBLI 17013)
- 256. Industri Kertas Khusus (KBLI 17014)
- 257. Industri Pencetakan Khusus (KBLI 18112)
- 258. Industri Karet Buatan (KBLI 20132)
- 259. Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan (KBLI 20301)
- 260. Industri Serat Stapel Buatan (KBLI 20302)
- 261. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia (KBLI 21011)
- 262. Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*) (24101)
- 263. Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*) (KBLI 24402)
- 264. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201)
- 265. Industri Senjata dan Amunisi (KBLI 25200)
- 266. Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya (KBLI 27320)
- 267. Industri Kendaraan Perang (KBLI 30400)
- 268. Industri Produksi *Radioisotop* (Kontruksi Fasilitas Produksi *Radioisotop*) (KBLI 32906)
- 269. Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium (KBLI 32907)
- 270. Industri Reparasi Produk Senjata dan Amunisi (KBLI 33112)
- 271. Aktivitas Pengepakan (KBLI 82920)
- 272. Aktivitas Keinsinyuran dan Kosultasi Teknis YBDI (Jasa Konsultasi) (KBLI 71102)
- 273. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (KBLI 74909)

- 274. Jasa Sertifikasi (KBLI 71201)
- 275. Jasa Pengendalian Laboratorium (KBLI 71202)
- 276. Jasa Inspeksi Periodik (KBLI 71203)
- 277. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204)
- 278. Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205)
- 279. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209)

E. SEKTOR PERDAGANGAN

- 280. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan C (KBLI 47221)
- 281. Tanda Daftar Gudang (TDG) (KBLI 52101)

F. SEKTOR PERHUBUNGAN

- 282. Angkutan Jalan Rel Wisata (KBLI 49442)
- 283. Angkutan Jalan Rel Lainnya (KBLI 49450)

G. SEKTOR PERTANIAN

- 284. Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262)
- 285. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (KBLI 01411)
- 286. Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah (KBLI 01412)
- 287. Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong (KBLI 01413)
- 288. Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah (KBLI 01414)
- 289. Perternakan Babi (KBLI 01450)
- 290. Budidaya Ayam Ras Pedaging (KBLI 01461)
- 291. Budidaya Ayam Ras Petelur (KBLI 014622)
- 292. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilanganya (KBLI 01463)
- 293. Budidaya Ayam Lokal dan Persilanganya (KBLI 01464)
- 294. Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek (KBLI 01465)
- 295. Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh (KBLI 01466)
- 296. Pembibitan Ayam Ras (KBLI 01468)
- 297. Jasa Penetasan Telur (KBLI 01623)
- 298. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik (KBLI 47726)
- 299. Aktivitas Kesehatan Hewan (KBLI 75000)

H. SEKTOR LINGKUNGAN

- 300. Pengumpulan Limbah Berbahaya (KBLI 38120)

VI. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TIDAK MELALUI OSS

A. SEKTOR KESEHATAN

- 301. Surat Izin Praktek Dokter
- 302. Surat Izin Praktik Dokter Mandiri

303. Surat Izin Praktek Dokter Internsip dan Residen
304. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
305. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
306. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP)
307. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
308. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
309. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
310. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
311. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
312. Surat Izin Praktik Fisioterapis Mandiri (SIPFM)
313. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
314. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
315. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ALTM)
316. Surat Izin Praktik Elektromedik (SIP-E)
317. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
318. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
319. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
320. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
321. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
322. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
323. Surat Izin Praktik Bidan Mandiri (SIPBM)
324. Surat Izin Praktik Tenaga Psikolog Klinis (SIPPK)
325. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
326. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT)
327. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
328. Surat Izin Praktik Perawat Mandiri (SIPPM)

B. SEKTOR SOSIAL

229. Izin Pengumpulan uang atau barang (PUB)
330. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan (LKS/LKSA)

C. SEKTOR PEKERJAAN UMUM

331. Despensasi melintas jalan (*Crossing*)
332. Izin pemanfaatan ruang milik jalan

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

- 1. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
- 2. Pengendalian perizinan berusaha berbasis risiko

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI